

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PETANI MANDIRI (PPM)

Oleh

Lailly Mufidah

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : laillymufidah5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, dan untuk mengetahui dampak adanya Program Petani Mandiri (PPM) terhadap kesejahteraan petani. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan (observation), wawancara (interview), dan studi pustaka (documentation). Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani berupa Program Petani Mandiri (PPM), Program ini merupakan program prioritas yang berisikan bantuan modal, akses pelatihan serta usaha pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian serta asuransi gagal panen. Program Petani Mandiri (PPM) bukan hanya memberi dampak positif terhadap petani. Akan tetapi, keluarga atau anak petani juga mendapatkan bantuan berupa beasiswa.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan Petani & Program Petani Mandiri (PPM)

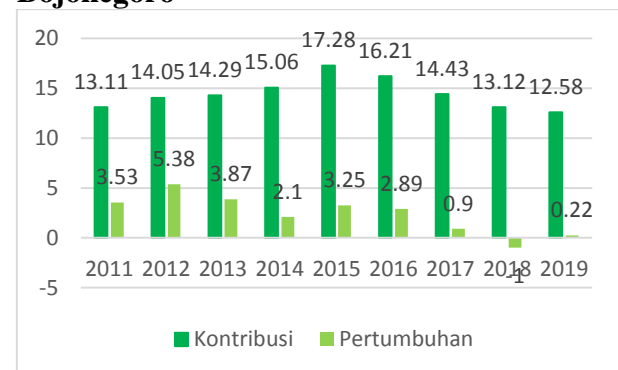
PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberi pendapatan sebagian besar rumah tangga masyarakat pedesaan di Indonesia (Tati Budiarti, 2013). Sektor pertanian merupakan sektor yang terdiri dari beberapa subsektor, diantaranya subsektor tanaman bahan makanan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Hal ini, tentu mampu menyediakan kebutuhan pokok. Selain itu, sektor ini mampu menciptakan kesempatan kerja terutama masyarakat pedesaan. Sehingga fokus terhadap pembangunan sektor pertanian dengan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat terpenuhinya kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta terciptanya lapangan kerja yang luas.

Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Jawa Timur, yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Salah satu sektor perekonomian non migas sangat

bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) selama tahun 2011-2019 rata-rata berkisar 14,46 persen, terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian

Gambar 1. Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Bojonegoro



Sumber : BPS Bojonegoro, 2020

Kontribusi pertanian terhadap PDRB yang cenderung menurun dapat mengindikasikan terjadi permasalahan ataupun tantangan yang cukup berarti dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. Agar tidak terjadi hambatan atau kendala di tingkat produsen yang berakibat dalam meningkatnya biaya produksi sehingga merugikan para petani.

Pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam rangka meningkatkan produktivitas sampai saat ini terus melakukan intrusi terhadap sektor pertanian. Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Program Petani Mandiri (PPM). Program ini berisikan program bantuan modal, akses pelatihan serta usaha pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian serta asuransi gagal panen, dan peternakan, serta beasiswa.

Dari berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoroterdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji didalam penelitian berikut ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani?
2. Bagaimana dampak adanya Program Petani Mandiri (PPM) terhadap peningkatan kesejahteraan petani?

Dari rumusan masalah tersebut terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya Program Petani Mandiri (PPM) dalam terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Pemerintah

Menurut B.R.S Parker mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah merupakan tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau respon terhadap suatu keadaan kritis. Makna dari definisi tersebut bahwa, kebijakan pemerintah mempunyai asas dari tindakan tertentu dalam waktu tertentu pula untuk menjawab atau memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat.

Definisi kebijakan pemerintah secara umum memiliki makna sebagai berikut (Bahan Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII Prodi Ilmu Pemerintahan, 2012-2013):

- a. Kebijakan pemerintahan berupa pilihan upaya pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
- b. Upaya-upaya pemerintah diperuntukkan kepada anggota masyarakat yang bersifat mengikat.
- c. Upaya-upaya pemerintah dari pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum finansial untuk melaksanakan.
- d. Upaya-upaya pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
- e. Upaya-upaya pemerintah memiliki tujuan tertentu.
- f. Upaya-upaya pemerintah selalu diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat atau publik.

2. Kesejahteraan

Menurut Ferguson, Horwood dan Beutrais kesejahteraan keluarga dapat dikatakan sebagai kesejahteraan ekonomi. (family economic well-being) dan kesejahteraan material (family material well-being). Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dengan adanya pemenuhan input keluarga (pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran), kemudian untuk kesejahteraan material dapat diukur dari

bentuk barang dan jasa yang dicapai oleh keluarga.

Kesejahteraan berkarakter sangat luas yang diterapkan di skala sosial besar dan kecil sebagai contoh keluarga dan individu. Konsep kesejahteraan atau rasa sejahtera yang bersifat relatif, tergantung dari penilaian masing-masing individu. Sejahtera menurut seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum tentu dapat dinamakan sejahtera bagi orang lain (Regina Arisandi, 2016).

3. Petani

Petani merupakan orang yang melakukan usaha pertanian (tanaman, bahan makanan, dan tanaman perkebunan rakyat) dengan resiko sendiri yang bertujuan untuk dijual ataupun dikonsumsi dirinya sendiri. Adapun sebagian petani pemilik maupun petani penggarap (sewa, kotrak dan bagi hasil). Orang yang bekerja di ladang atau sawah orang lain dengan tujuan mengharap upah, yakni sebagai buruh tani bukan termasuk petani.

4. Program Petani Mandiri (PPM)

Program ini merupakan program baru berupa Kartu Petani Mandiri (KPM) yang bisa membantu petani untuk mensejahterakannya. Mereka menjadi lebih berdaya dengan adanya program ini. Petani memiliki akses bantuan modal untuk dibelikan pupuk, dan sarana produksi pertanian. Dengan syarat mereka harus bergabung dengan kelompok tani dan modal akan disalurkan melalui kelompok tani tersebut, syarat lainnya petani tersebut memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar. Bantuan tersebut bersifat hibah. Anggaran yang disediakan kurang lebih sekitar Rp. 75 miliar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis makna yang terkandung didalamnya, sebagai makna yang dengan sengaja disembunyikan sehingga membuat data deskriptif dalam bentuk kata-

kata, adapun bersifat tertulis maupun tidak tertulis (Sugiyono, 2006)

Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik dengan mendeskripsikan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Penjelasan tentang “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM)”

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang masyarakatnya membentuk kelompok tani, serta mengikuti program Petani Mandiri. Peneliti hanya mengambil beberapa kelompok tani yang terwakili di kabupaten tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai prosedur (Surakhmad, 1994). 1) pengamatan (observation), peneliti melakukan kegiatan turun lapangan di lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi yang terkait dengan program petani mandiri tersebut. 2) wawancara (interview), dengan adanya wawancara, bertujuan untuk melaksanakan tanya jawab yang berkaitan dengan program petani mandiri tersebut, dan 3) studi pustaka (documentation), peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, peraturan, laporan, yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Data yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif sesuai prosedur (Moeloeng, JL., 2007), terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dinas pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, dapat diukur menggunakan variabel Edward III antara lain:

a. Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten bojonegoro melalui dinas pertanian sudah cukup jelas, dilihat dari selalu

menyelenggarakan sosialisasi baik pada petani maupun kepada petugas di masing-masing kecamatan. Kemudian untuk tingkat pemahaman para pelaksana cukup baik dengan adanya rapat yang harus diikuti oleh seluruh pelaksana sehingga mereka paham akan yang harus dikerjakan.

b. Sumber Daya

Untuk indikator sumber daya, berupa sumber dana, sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas sarana, pra sarana yang masih belum tercukupi. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan oleh pusat harus dibagi dalam masing-masing bidang di Dinas pertanian. Sumber daya manusia (SDM) dinas pertanian kabupaten Bojonegoro masih kekurangan tenaga. Untuk sarana dan prasarana masih kekurangan petugas untuk membantu menjalankan kegiatan langsung terjun di lapangan.

c. Disposisi

Sikap pelaksana sudah cukup baik dilihat dari adanya komitmen yang dibangun pada masing-masing petugas. Adanya tindakan partisipatif dari Bupati Bojonegoro dan Dinas pertanian untuk menunjukkan para petani bahwa mereka sangat antusias dengan keberhasilan sektor pertanian. Hal ini data dilihat dari media massa bahwa pemerintahan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan para petani.

d. Standart Operating Procedures (SOP)

Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk mempermudah para pegawai pemerintah tersebut bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. SOP yang baik akan memberikan hasil yang baik pula.

Untuk melihat sejauh mana kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro, peneliti menggunakan data Distribusi PDRB di Kabupaten Bojonegoro

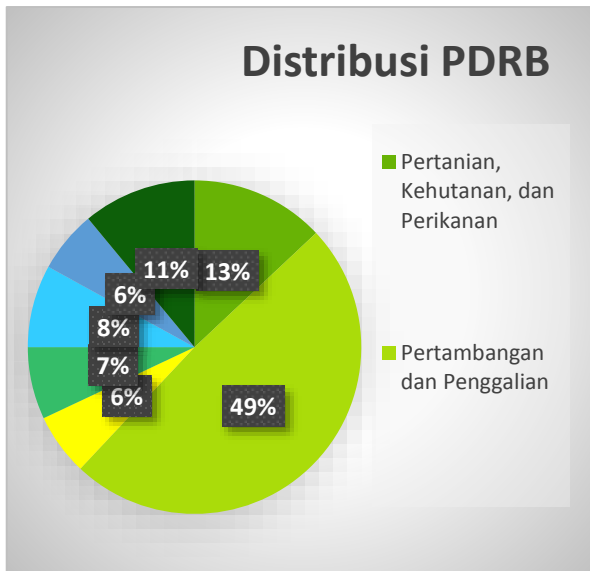
PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang diwujudkan dari berbagai aktivitas ekonomi (Suryani, 2018), salah satunya di bidang pertanian. Besarnya nilai tambah suatu sektor terhadap total nilai PDRB yang ditampilkan dalam bentuk persen disebut

sebagai kontribusi atau peran sektor. Semakin besar kontribusi suatu sektor terhadap total PDRB maka sektor tersebut semakin dominan dalam perekonomian wilayah tersebut. Dengan mengamati transisi kontribusi sektor per tahun maka dapat mengetahui sektor mana yang semakin melemah dalam perekonomian wilayah tersebut.

Pada Tahun 2010, PDRB ADHB Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 78.047,312 milyar, naik sebesar Rp. 4.815,09 milyar jika dibanding dengan tahun sebelumnya yakni Rp. 73.232,22 milyar. Adapun PDRB ADHK tercatat sebesar Rp.69.987,99 milyar atau tumbuh sebesar 6,34 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro adalah pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, dan industri pengolahan. Sekitar 83,55 persen nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro merupakan peran atau sumbangan dari lima kategori lapangan usaha tersebut.

Sebagai salah satu leading store, kontribusi sektor pertanian mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 14,43 persen, tahun 2018 turun menjadi 13,12 persen. Kemudian tahun 2019 kontribusi sektor pertanian kembali mengalami penurunan menjadi 12,58%.

Gambar 2. Distribusi PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 (%)



Sumber : Kab. Bojonegoro Dalam Angka,2020

Dalam arah kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengimplementasikan Program prioritas yakni Program Petani Mandiri (PPM). Program ini merupakan program baru berupa Kartu Petani Mandiri (KPM) yang bisa membantu petani untuk mensejahterakannya. Mereka menjadi lebih berdaya dengan program ini. Petani memiliki akses bantuan modal untuk dibelikan pupuk, dan sarana produksi pertanian. Dengan syarat mereka harus bergabung dengan kelompok tani dan modal akan disalurkan melalui kelompok tani tersebut, syarat lainnya petani tersebut memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar. Bantuan tersebut bersifat hibah. Anggaran yang disediakan kurang lebih sekitar Rp. 75 miliar.

Dampak Program Petani Mandiri (PPM) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program PPM ini memberi dampak positif terhadap para petani, bukan hanya petani saja tetapi keluarga atau anak petani, yakni sebagai berikut :

a. Bantuan Modal

Memberikan akses bagi rumah tangga atau keluarga petani untuk mendapatkan

bantuan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal 10 juta. Para pemilik kartu ini akan mendapatkan bantuan barang dari Pemkab sesuai kebutuhan.

b. Memberikan jalan masuk atau akses pelatihan dan pengembangan usaha tani

Kartu ini berbeda dengan kartu jaminan yang dikeluarkan pemerintah pada umumnya, Kartu Petani Mandiri memberikan fasilitas yang baru yaitu prioritas utama yakni berupa pelatihan dan pengetahuan terkait pengembangan usaha tani, maka dari itu, para petani bias mengembangkan usahanya agar bias lebih maju.

c. Jaminan pembelian hasil pertanian

Petani yang memiliki keraguan untuk menjual hasil pertanian-nya, melalui kartu ini hasil pertanian dari para petani di Bojonegoro bisa mendapatkan jaminan pembelian dari pemkab, selanjutnya pemkab akan bekerja sama dengan BUMD dan BUMDes untuk membeli hasil pertanian dan petani lokal Bojonegoro.

d. Asuransi Gagal Panen dan Peternakan

Setiap usaha pasti akan menemui kegagalan, melalui KPM ini akan mendapatkan asuransi khusus sesuai ketentuan yang ada.

e. Sebagai jalan masuk atau akses untuk mendapat beasiswa bagi keluarga pemegang Kartu Petani Mandiri (KPM)

Bukan hanya Kartu Pelita Harapan (KPH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan lain sebagainya. Yang dikeluarkan pemerintah akan mudah untuk mendapatkan beasiswa. Kartu Petani Mandiri (KPM) juga akan memberi peluang beasiswa baru untuk seseorang yang merasa memiliki kekurangan dalam berpendidikan atau belum bisa membiayai pendidikannya untuk menempuh pendidikan strata I.

PENUTUP**Kesimpulan**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro. Kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 mencapai 12,58 persen. Meskipun demikian, kontribusi tersebut turun dari tahun sebelumnya. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa Program Petani Mandiri (PPM). Program ini memberikan dampak positif terhadap petani untuk peningkatan kesejahteraannya, selain itu, bukan hanya petani saja melainkan keluarga atau anak petani juga mendapat beasiswa dari program tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil survei masih ada masyarakat atau kelompok tani yang belum mengetahui Program Petani Mandiri (PPM) maka dari itu, perlu diadakan atau dilaksanakan sosialisasi yang lebih kepada para petani khususnya petani di daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Bojonegoro, 2020
- [2] Bahan Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII Prodi Ilmu Pemerintahan. (2012-2013).
- [3] Moeloeng, JL. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Regina Arisandi. (2016). Tingkat Kesejahteraan Petani Rotan di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Jurnal Pendidikan Georafis, 3, 60.
- [5] Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,. Bandung: Alfabeta.
- [6] Surakhmad. (1994). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik. Bandung: Tarsito.
- [7] Suryani, E. (2018). Pengaruh Sub Sektor Tanaman Holtikultura Terhadap peningkatan PDRB Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Tanggamus) Skripsi UIN Raden Intan Lampung. Lampung.

- [8] Tati Budiarti. (2013, Desember). Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat Pada Usaha Tani Terpadu Guna meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Sistem Pertanian. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 18, 200.